

**Bank Kalimantan Selatan Bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah Naik Kelas**



**Sumber gambar:**

*<https://kalsel.antaranews.com/berita/378906/bank-kalsel-bersama-bpkp-provinsi-mendukung-umkm-naik-kelas>*

Bank Kalsel bekerjasama dengan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar diskusi terbatas UMKM naik kelas, bersama 100 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari kota Banjarmasin dan Banjarbaru serta kabupaten Banjar, di aula kantor BPKP provinsi di Banjarbaru. Diskusi bertajuk Bakayuh Baimbai mendukung Program P3DN melalui penguatan UMKM ini, di hadiri oleh Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin sebagai narasumber, yang diwakili Kepala Divisi UMK Bank Kalsel, Noor Imansyah. Hadir pula sebagai narasumber Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, Sekretaris Dinas Perindustrian serta perwakilan dari BPKP provinsi. Acara dibuka Kepala BPKP perwakilan provinsi Kalsel, Rudy M. Harahap.

Dalam sambutannya, Kepala Divisi UMK Bank Kalsel, Noor Imansyah mengatakan, diskusi ini digelar sebagai wujud dan peran Bank Kalsel sebagai agen pembangunan daerah. Dimana salah satu tugas penting Bank Kalsel, adalah menyalurkan dana atau mendukung permodalan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil, sehingga memungkinkan masyarakat terutama pelaku UMKM/IKM di Kalsel, melakukan kegiatan usaha.

Tentunya ini juga untuk membantu mendorong salah satu program pemerintah, yaitu Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Salah satu bentuk penggunaan P3DN adalah dengan mewajibkan kami serta instansi pemerintah

memaksimalkan penggunaan produk - produk barang dan jasa dalam negeri, yaitu melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh APBD dan APBN melalui E Katalog. Salah satu tujuan utama pertemuan ini juga untuk mendorong penggunaan atau pemanfaatan E Katalog di kalangan pelaku UMKM/IKM Kalsel. Dimana tujuannya, agar produk barang dan jasa milik UMKM, nantinya dapat digunakan atau dimanfaatkan instansi pemerintah. Dan apabila nanti Bapak/Ibu sudah ditunjuk sebagai pengada barang dan jasa dari suatu instansi maka jangan lupa nanti untuk kebutuhan kredit/pembiayaannya bisa kami bantu melalui KUR Bank Kalsel ya Bapak/Ibu.

Selain hadir sebagai peserta diskusi, para pelaku UMKM juga diberi kesempatan memamerkan produknya selama acara berlangsung, serta dimudahkan untuk mengurus Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Kalsel, yakni dengan hadirnya seluruh tim divisi UMK Bank Kalsel, dari cabang utama, A. Yani Banjarmasin, unit Landasan Ulin Banjarbaru, cabang Banjarmasin serta kota Martapura.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/378906/bank-kalsel-bersama-bpkp-provinsi-mendukung-umkm-naik-kelas>, 20 Juli 2023.
2. <https://www.beritaja.com/bank-kalsel-bersama-bpkp-provinsi-mendukung-umkm-naik-kelas-beritaja-57277.html>, 20 Juli 2023.

#### **Catatan Berita:**

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk

periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

#### Program Pembangunan Nasional

- Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.
- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Rincian Program Pembangunan

##### Kondisi Umum

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon,

pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

- Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.

#### Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembanguna Jangka Panjang Tahun 2005-2025

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan

pertambahan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.

- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pematapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga-lembaga

pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.

- Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.

### Struktur APBD

